



EDISI KAMIS 02 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Manajer Kopdes Tak Lagi Disiapkan Jadi Komcad

04

NUSANTARA
Ketika BBM Nonsubsidi Lain Turun, Harga Pertamina Bergeming

10

LISTSTYLE
Dari Stadion ke Jalanan, Jersey Sepak Bola Berubah Jadi Simbol Fesyen Baru

Jun 2026
127,65

Mei 2026
127,73

Apr 2026
125,24

Mar 2026
125,35

Feb 2026
125,45

Jan 2026
123,60

Des 2025
125,35

Nov 2025
124,05

Okt 2025
124,33

Sep 2025
125,35

Aug 2025
123,57

Jul 2025
122,64

Tren
NTP
Jul '25 -
Jun '26

Anomali Beras Di Indonesia

HARGA MELONJAK PARAH KALA STOK BERLIMPAH

Kenaikan Harga Beras Juni 2026

Perubahan Bulanan ●
Perubahan Tahunan ●

TOTAL PENGGILINGAN
● +0,97% ● +6,96%

Beras Premium (Penggilingan)
● +1,01% ● +6,96%

Beras Medium (Penggilingan)
● +0,92% ● +5,10%

Grosir
● +0,82% ● +5,12%

Eceran
● +0,45% ● +3,98%

Sumber :
Berbagai
Sumber
Diolah

Inflasi Nasional

Bulanan (M-to-M)
0,44%

Tahunan (Y-to-Y)
3,34%

Tahun Kalender (Y-to-D)
1,79%

Foto udara para petani sedang mencabut bibit padi untuk ditanam di sawah di Provinsi Aceh, Indonesia, pada 20 November 2025. (Dok.AFP)

Kondisi pangan terutama komoditas beras di Indonesia terus menunjukkan anomali. Selama enam bulan berturut-turut, harga makanan pokok ini terus menanjak. Padahal pemerintah mengklaim stok nasional aman. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras Juni 2026 naik 0,45 persen secara bulanan dan 3,98 persen secara tahunan. Rata-rata harga beras eceran pun menembus Rp15.440 per kilogram. Padahal, produksi beras Januari-Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 25,28 juta ton. Naik tipis 0,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kesenjangan antara pasokan dan harga membuka kembali persoalan lama soal tata niaga yang tidak efisien dan rantai distribusi yang belum terkendali. Lebih ironis, di saat konsumen membayar lebih mahal, petani justru belum menikmati lonjakan harga tersebut. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Juni 2026 malah turun 0,06 persen menjadi 127,65. Disebut, pemicunya adalah kenaikan harga yang diterima petani sebesar 0,49 persen masih kalah dibanding biaya yang mereka bayar yang naik 0,55 persen. Normalakah saat beras melimpah di angka produksi, tetapi mahal saat rakyat mau mengonsumsi? BACA HAL 11...

MANAJER KOPDES TAK LAGI DISIAPKAN JADI KOMCAD

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memutuskan mengubah pola pelatihan bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan menjadi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Para peserta tidak lagi disiapkan sebagai bagian dari Komponen Cadangan (Komcad) sehingga pelatihan dasar militer (latsarmil) yang sebelumnya diterapkan resmi dihentikan.

Keputusan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal TNI (HOR) Donny Ermawan Taufanto setelah rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Donny mengatakan perubahan program dilakukan setelah Kemhan



Seorang siswa terlihat menangis saat diantar oleh orang tua pada hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Jakarta, Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta. Dok

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan SPPI, termasuk setelah lima peserta meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dengan pola pendidikan militer.

"Yang semula mereka juga akan menjadi Komponen Cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya

diberikan pembinaan pendidikan pelatihan bela negara yang sangat berbeda sekali dengan Komcad," ujar Donny.

Dengan perubahan tersebut, materi yang berkaitan dengan kemampuan militer seperti penggunaan senjata dan taktik tempur tidak lagi masuk dalam kurikulum peserta SPPI.

"Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer," kata Donny.

Sebagai gantinya, pelatihan akan diarahkan pada pembentukan karakter dan kemampuan kepemimpinan yang mendukung tugas peserta setelah ditempatkan di lapangan. Materi yang diberikan mencakup nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, serta koordinasi.

"Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme, terkait dengan patriotisme, terkait dengan disiplin," jelas Donny.

"Kita memberikan pelajaran kepada mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan, bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut," lanjutnya.

Menurut Donny, calon manajer Kopdes nantinya tetap membutuhkan kemampuan memimpin karena akan mengelola tim dalam menjalankan koperasi.

"Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," ucapnya.

Selain mengubah materi, Kemhan juga memangkas durasi pelatihan bela negara. Jika sebelumnya peserta menjalani pendidikan ala Komcad selama satu bulan, kini pelatihan bela negara hanya berlangsung selama dua minggu. "Dari segi waktu juga berkurang, yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," ujar Donny.

Setelah menyelesaikan pendidikan bela negara, peserta akan mengikuti pelatihan manajerial selama satu bulan. Materi pelatihan akan disesuaikan dengan bidang penugasan masing-masing.

Peserta yang diarahkan mengelola koperasi akan mendapatkan modul dari Kementerian Koperasi. Sementara peserta yang ditempatkan pada program kampung nelayan akan menerima materi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kalau yang ke koperasi mereka akan lebih banyak diberikan materi modul-modul terkait dengan koperasi, kalau yang kampung nelayan mereka akan diberikan modul-modul terkait dengan kampung nelayan tersebut," papar Donny.

Ia menambahkan, kementerian terkait telah menyiapkan materi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing. Dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya. Demikian juga dari KKP sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya. (wid ist/dya)

MENGENAL KOMPONEN CADANGAN (KOMCAD)

Apa itu Komcad?

- Program pertahanan negara untuk menyiapkan sumber daya nasional sebagai kekuatan pendukung TNI.
- Dibentuk Kementerian Pertahanan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN.
- Bertujuan memperkuat Komponen Utama (TNI) saat negara menghadapi ancaman.

Siapa Anggota Komcad?

- Warga negara sipil yang mendaftar secara sukarela.
- Bisa berasal dari:
 - Karyawan
 - ASN
 - Mahasiswa
 - Wiraswasta
- Harus lolos seleksi dan mengikuti pelatihan militer.

Status Anggota Komcad

- Bukan wajib militer Keikutsertaan berdasarkan kemauan sendiri.
- Tetap warga sipil
- Tetap menjalani profesi dan kehidupan normal.
- Tidak menjadi prajurit TNI aktif.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal TNI (HOR) Donny Ermawan Taufanto mengatakan tim gabungan tersebut dibentuk untuk mengumpulkan informasi tambahan dan mencari tahu faktor yang menyebabkan para peserta meninggal saat mengikuti pendidikan.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal TNI (HOR) Donny Ermawan Taufanto mengatakan tim gabungan tersebut dibentuk untuk mengumpulkan informasi tambahan dan mencari tahu faktor yang menyebabkan para peserta meninggal saat mengikuti pendidikan.

Kemhan-Kemenkes Bentuk Tim Investigasi

"Terkait dengan meninggalnya lima ini kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan," ujar Donny usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Donny menjelaskan, hasil investigasi nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program SPPI ke depan.

"Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi," katanya.

Menurut Donny, berdasarkan informasi awal, penyebab meninggalnya lima peserta tidak sama. Beberapa di antaranya diduga berkaitan dengan perubahan pola hidup dari kehidupan sipil menuju sistem pendidikan yang lebih disiplin di lingkungan barak.

"Mungkin karena perubahan pola

hidup dari sipil masuk ke barak, kemudian mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia," ujar Donny.

Ia menyebut terdapat peserta yang memiliki riwayat penyakit tertentu meski sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat mengikuti pelatihan.

Donny juga mengungkapkan terdapat peserta yang mengalami gangguan kesehatan terkait paru-paru dan jantung. Untuk kasus yang berkaitan dengan penyakit paru-paru, Kemhan bersama Kemenkes melakukan langkah pencegahan agar tidak terjadi penularan kepada pesertalain.

"Termasuk juga yang kejadian di Halim terkait dengan paru-paru, ini juga karena ada penularan di sana, ini juga kami lakukan tindakan pencegahan bersama dengan Kementerian Kesehatan," jelasnya. (tin,ist/dya)

MENCUAT WACANA CAPRES WAJIB DIDUKUNG 3 PARTAI PARLEMEN, BENARKAH?

Isu mengenai kemungkinan adanya aturan baru dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan pasangan calon presiden dan wakil presiden didukung minimal tiga partai politik parlemen mulai ramai diperbincangkan. Wacana tersebut muncul di tengah persiapan perubahan regulasi Pemilu 2029 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam UU Pemilu. Namun, pimpinan Komisi II DPR RI memastikan bahwa isu tersebut belum menjadi bagian dari pembahasan resmi di parlemen.

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya belum pernah membahas usulan mengenai kewajiban pasangan capres-cawapres harus diusung sedikitnya tiga partai politik yang memiliki kursi di DPR.

Menurut Rifqi, Komisi II saat ini masih berada pada tahap awal revisi UU Pemilu, yakni menyerap berbagai masukan dan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM), bukan membahas substansi perubahan aturan pencalonan presiden.

Pernyataan itu disampaikan Rifqi merespons tulisan anggota DPR RI Benny K. Harman yang menyinggung adanya kemungkinan desain baru dalam revisi UU Pemilu terkait syarat dukungan partai untuk pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Saya malah enggak tahu itu katanya dari mana. Jadi tanya ke Pak Benny, beliau dapat info dari mana," kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (1/7/2026).



Ilustrasi: Warga memeriksa surat suara sebelum melakukan pencoblosan saat pemungutan suara pilkada. (dok.ant)

Rifqi menjelaskan, berdasarkan penugasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026, Komisi II memang mendapat tugas untuk menyiapkan naskah akademik dan draf revisi UU Pemilu. Akan tetapi, proses tersebut

belum masuk dalam tahap pembahasan pasal maupun perubahan substansi.

Karena itu, ia mempertanyakan sumber informasi mengenai adanya rencana pengaturan baru soal syarat

pencalonan presiden. "Kalau Pak Benny K. Harman sudah mengetahui substansinya lebih dulu, saya justru bertanya dari mana beliau mengetahuinya. Tapi kalau di Komisi II, itu belum pernah ada pembahasan seperti itu," tegasnya.

Rifqi menambahkan, pekerjaan Komisi II saat ini masih berfokus menyusun daftar persoalan yang akan menjadi bahan pembahasan revisi UU Pemilu. Setelah DIM selesai, dokumen tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk proses berikutnya.

"Tugas Komisi II memastikan bahwa kami siap. Cara untuk memastikannya apa? Kami sekarang sedang menyusun daftar inventarisasi masalah yang akan segera kami sampaikan kepada pimpinan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu bukan merupakan kewenangan langsung Komisi II. Pembentukan Panja berada dalam ranah keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

Pernyataan senada disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong. Ia mengaku belum mengetahui adanya usulan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib mendapat dukungan minimal tiga partai politik parlemen.

Bahtra menyebut, sampai saat ini Komisi II belum memasuki tahap pembahasan substansi revisi UU Pemilu, termasuk mengenai mekanisme pencalonan presiden.

"Kalau misalnya Pak Benny menyampaikan ada isu terkait soal itu, kami juga baru tahu ya bahwa isunya dari mana, karena sampai sejauh ini sih belum ada tahapan ke arah sana," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, Komisi II masih memprioritaskan proses menyerap aspirasi publik dan berbagai pihak terkait desain Pemilu ke depan.

"Sejauh ini kami masih concern terhadap bagaimana terus menyerap aspirasi dari berbagai pihak tentunya. Jadi kalau misalnya ada penyampaian bahwa harus diusung oleh tiga partai parlemen, kami belum masuk ke tahapan sana," tegasnya. (gus,ist/kum)

DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung

KOMISI II DPR RI memastikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat tetap menjadi bagian dari sistem demokrasi Indonesia. Sikap tersebut disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tetap harus dilakukan melalui mekanisme langsung oleh masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, pihaknya menghormati putusan MK yang menegaskan kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah. Namun, ia menegaskan bahwa Komisi II belum akan masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada karena saat ini fokus utama parlemen adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

"Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa kami menghormati, menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah

Konstitusi. Tetapi fokus kami saat ini kan di DPR yang masuk Prolegnas di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu," ujar Bahtra di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bahtra menegaskan, putusan MK menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia karena menegaskan kembali bahwa pemilihan kepala daerah merupakan hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.

"Jadi, konsen kami, terutama di Komisi II yang ditugasi oleh pimpinan DPR, adalah bagaimana pembahasan RUU Pemilu ini. Jadi, kami belum membahas soal RUU Pilkada," kata Bahtra.

"Namun, tentu kami menghargai ya, menghormati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," lanjutnya.

Di tengah isu mengenai masa depan sistem pemilu, Komisi II DPR kini memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu. Bahtra mengatakan proses penyusunan regulasi tersebut masih berada pada tahap awal, yakni

menyerap masukan dari berbagai pihak. Menurut dia, DPR ingin memastikan perubahan aturan pemilu tidak hanya berasal dari pembahasan internal parlemen, tetapi melibatkan partisipasi publik secara luas.

Menurut dia, DPR ingin memastikan perubahan aturan pemilu tidak hanya berasal dari pembahasan internal parlemen, tetapi melibatkan partisipasi publik secara luas.

"Ya kami di Komisi II ingin memastikan bagaimana agar pelibatan partisipasi publik itu betul-betul dikedepankan dalam hal pembuatan undang-undang," ujar Bahtra. Komisi II juga berencana mendatangi sejumlah partai politik, termasuk partai nonparlemen, untuk mendengarkan pandangan mereka mengenai desain Pemilu ke depan.

Bahtra mengatakan seluruh pihak memiliki kesempatan memberikan masukan sebelum pembahasan RUU Pemilu masuk ke tahap substansi. (tin,ist/dya)

KETIKA BBM NONSUBSIDI LAIN TURUN, HARGA PERTAMAX BERGEMING

Harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian pada Juli 2026, namun harga Pertamina (RON 92) tetap bergeming di level Rp16.250 per liter. Diketahui, Pertamina Turbo dan BBM diesel nonsubsidi seperti Pertamina Dex serta Dexlite yang mengalami penurunan harga.

Keputusan mempertahankan harga Pertamina dinilai masih sesuai dengan kondisi harga keekonomian saat ini. Praktisi senior industri minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo memperkirakan harga keekonomian Pertamina berada di kisaran Rp16.200 per liter, sehingga selisih dengan harga jual saat ini sangat tipis.

Menurut Hadi, perhitungan tersebut dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah rata-rata sepanjang tahun sekitar US\$88 per barel dan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.200 per dolar AS. Dari perhitungan itu, harga dasar Pertamina berada di kisaran Rp15.700 per liter. Setelah ditambah biaya distribusi serta pajak, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp16.200 per liter.

"Kalau harga crude US\$88/barel, kurs Rp17.200/US\$, yield 0,6; maka harga [dasar Pertamina] sekitar Rp15.700. Ditambah cost distribusi dan pajak-pajak, sekitar Rp500, maka total harganya sekitar Rp16.200/liter. Artinya, secara komersial, harga Pertamina wajar tidak turun bulan ini,"



(Ilustrasi) Antrean panjang di SPBU Pertamina di Surabaya

kata Hadi Ismoyo.

Selain itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menghitung harga keekonomian Pertamina bahkan berada di sekitar Rp16.444 per liter. Perhitungan itu menggunakan asumsi rata-rata harga minyak Brent tahun berjalan sebesar US\$87,9 per barel serta rata-rata kurs rupiah Rp17.195 per dolar AS.

Josua menilai ruang penurunan

harga Pertamina masih terbatas karena harga jual Rp16.250 per liter saat ini sudah mendekati harga keekonomiannya.

"Dengan asumsi rata-rata Brent sepanjang tahun berjalan US\$87,9/barel dan rata-rata USD/IDR Rp17.195, perhitungan interpolasi dalam dokumen menunjukkan harga ke-ekonomian Pertamina atau bensin RON 92 sekitar Rp16.444/liter," ujar Josua.

Data harga BBM Pertamina Juli 2026:

- Pertamina RON 92: Rp16.250/liter (tetap)
- Pertamina Turbo RON 98: Rp19.300/liter (turun Rp1.450)
- Pertamina Green 95: Rp17.000/liter (tetap)
- Pertamina Dex: Rp21.150/liter (turun Rp3.650)
- Dexlite: Rp19.700/liter (turun Rp3.300)
- Peralite: Rp10.000/liter (tetap)
- Solar subsidi: Rp6.800/liter (tetap)

Sebelumnya, harga Pertamina sempat bertahan di angka Rp12.300 per liter selama sekitar tiga bulan sebelum naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Pertamina Patra Niaga menyebut kenaikan tersebut belum sepenuhnya mengikuti harga pasar karena penyesuaian baru sekitar 50 persen dari selisih harga keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Penyesuaian harga Pertamina yang dilakukan saat ini adalah 50% dari selisih harga pasar, dan jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga ASEAN tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian," kata Roberth.

Sementara itu, BBM nonsubsidi lain mengalami perubahan harga pada 1 Juli 2026. Pertamina Turbo turun Rp1.450 menjadi Rp19.300 per liter, Pertamina Dex turun Rp3.650 menjadi Rp21.150 per liter, dan Dexlite turun Rp3.300 menjadi Rp19.700 per liter. Adapun Pertamina Green 95 tetap Rp17.000 per liter, sedangkan BBM subsidi Peralite dan Solar masing-masing masih Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Selain faktor harga minyak dunia, Pertamina Patra Niaga menyebut penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari dinamika harga minyak global, kondisi fiskal, hingga daya beli masyarakat. (gus.ist/dya)

Efek Harga Minyak ke Inflasi dan Neraca Dagang

HARGA BBM nonsubsidi jenis Pertamina diproyeksikan berpotensi mengalami penurunan seiring melemahnya harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penurunan harga minyak mentah global akan menjadi salah satu faktor yang mendorong penyesuaian harga Pertamina secara bertahap.

Harga minyak dunia yang sebelumnya sempat melonjak hingga menembus 100 dolar AS per barel akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, kini mulai mengalami penurunan dan berada di bawah 69 dolar AS per barel.

Purbaya berharap, turunnya harga BBM nonsubsidi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi, terutama dari kelompok harga barang dan jasa yang diatur pemerintah.

Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia sebelumnya turut memberikan tekanan terhadap

perekonomian, termasuk meningkatkan biaya energi yang berdampak pada harga barang dan jasa.

Selain berdampak pada harga BBM, kenaikan harga minyak dunia juga disebut menjadi salah satu penyebab memburuknya neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026.

Purbaya menyebut, defisit neraca perdagangan terjadi karena membengkaknya nilai impor minyak dan gas, terutama akibat harga minyak bumi yang meningkat.

Defisit ini menjadi yang pertama setelah Indonesia mencatat surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut atau sekitar enam tahun.

"Saya pikir, saya harapkan sih nanti setelah harga minyak dunia kan sudah turun, pelan-pelan harga Pertamina saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan barang Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dolar AS atau sekitar Rp28 triliun.

Nilai ekspor Indonesia tercatat mencapai 23,20 miliar dolar AS, sementara impor berada di angka 24,81 miliar dolar AS.

Defisit terutama berasal dari sektor migas yang mencapai 3,76 miliar dolar AS, dipicu oleh tingginya impor hasil minyak dan minyak mentah.

Sementara itu, sektor nonmigas masih mencatatkan surplus sebesar 2,50 miliar dolar AS, ditopang oleh ekspor bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati, serta besi dan baja.

Pemerintah berharap tren penurunan harga minyak global dapat membantu menekan biaya energi, menjaga inflasi, sekaligus memperbaiki tekanan pada neraca perdagangan Indonesia. (Wid,ist/dya)

BABAK BARU KORUPSI BUPATI KUANSING: ISTRI KEDUA IKUT DIAMANKAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterlibatan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Salah satu pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut adalah istri kedua Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Suci Nitia Edward.

KPK menjelaskan, Suci diamankan bukan karena sudah berstatus tersangka, melainkan karena keberadaannya berkaitan dengan satu barang yang diduga memiliki hubungan dengan perkara, yakni mobil Mitsubishi Pajero Sport.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Suci merupakan satu dari lima orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan setelah OTT dilakukan.

"Bahwa betul tadi istri kedua Bupati ini kita amankan juga oleh tim karena kebetulan untuk yang mobil Pajero Sport itu digunakan oleh istri keduanya Bupati," ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski ikut diamankan dalam operasi tersebut, KPK memastikan Suci Nitia Edward belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih menempatkannya sebagai saksi dan akan mendalami keterangannya.

"Jadi untuk status istri kedua Suhardiman Amby adalah sebagai saksi dalam perkara ini," kata Taufik.

Menurut KPK, pemeriksaan terhadap Suci diperlukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan kendaraan Mitsubishi Pajero Sport yang diduga berkaitan dengan pemberian dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain.

"Artinya itu pihak-pihak yang diduga juga tadi menggunakan mobil hasil yang pemberian dari Zulkarnain. Jadi itu akan dimintai keterangan mungkin lebih lanjut nanti akan diperiksa secara intensif bagaimana penerimaannya seperti apa," tutur Taufik.

Berawal dari Seleksi Sekda 2025

Kasus ini bermula dari proses seleksi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing pada 2025. Saat itu terdapat dua nama yang mengikuti proses seleksi, yakni Fahdiansyah yang menjabat sebagai Asisten I Pemerintah Kabupaten Kuansing dan Zulkarnain yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

KPK menduga Bupati Kuansing Suhardiman Amby meminta imbalan berupa kendaraan mewah kepada pihak yang mengikuti proses seleksi jabatan tersebut.



Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (kiri) dan Sekda Kuansing, Zulkarnain (kanan) mengenakan rompi tahanan berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026).ist

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut Suhardiman yang menjabat sebagai Bupati Kuansing periode 2025-2030 diduga meminta kendaraan jenis SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S.

"SA (Suhardiman Amby) selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 kemudian 'meminta syarat' mobil SUV

Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para pihak atau calon yang mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kuansing," ujar Taufik.

Dari proses tersebut, KPK menyebut hanya Zulkarnain yang memenuhi permintaan tersebut. Setelah itu, Zulkarnain akhirnya terpilih menduduki posisi Sekda Kuansing.

Diduga Tarik Upeti dari Petani

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan lain yang dilakukan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby selain perkara dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menemukan dugaan adanya aliran uang yang berasal dari para petani melalui koperasi unit desa (KUD). Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Kuansing.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, selain dugaan suap jabatan, penyidik menemukan dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman.

"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)," kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (1/7/2026).

Menurut KPK, Pemerintah Kabupaten Kuansing memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi teknis terkait proses pelepasan lahan hutan. Namun, keputusan pelepasan kawasan hutan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan.

Dalam proses pendalaman perkara, KPK menduga terdapat permintaan uang yang bersumber dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi unit desa (KUD). Anggota koperasi tersebut merupakan para petani di Kuansing.

"Adapun, uang yang diminta diduga adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing," ujar Taufik.

Ia menyebut nilai yang diterima para petani sebenarnya tidak besar. Namun, uang yang diduga diminta tersebut disebut berasal dari penghasilan petani yang hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan.

"Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan

7 KASUS KORUPSI YANG DITANGANI KPK DI RIAU

- **1 Juli 2026 :**
Suap Lelang Jabatan Bupati Kuansing (Suhardiman Amby)
- **3 November 2025:**
Dugaan Tindak Pemerasan di Pemprov Riau
- **Tahun 2023:**
Pemotongan Anggaran
- **Tahun 2021:**
Suap Perpanjangan Izin Hak Guna Usaha (HGU)
- **Tahun 2014:**
Suap Alih Fungsi Hutan
- **Tahun 2012:**
Pengadaan Fasilitas untuk Penyelenggaraan PON
- **Tahun 2007:**
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Zulkarnain membeli satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S melalui sebuah showroom di wilayah Jabodetabek. Kendaraan tersebut memiliki nilai sekitar Rp2,05 miliar. (gus,ant,kum/dya)

ribu rupiah per bulannya tersebut, harus dipotong setengahnya," kata Taufik.

Dugaan penerimaan dari petani ini menjadi temuan tambahan KPK dalam kasus yang sebelumnya menyeret Suhardiman sebagai tersangka dugaan suap pengisian jabatan Sekda Kuansing.

Penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT) tersebut menjadi kasus korupsi ketujuh yang ditangani KPK di wilayah Provinsi Riau. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penindakan terhadap Suhardiman menambah daftar panjang perkara korupsi yang pernah ditangani lembaga antirasuah di Riau.

"Kami perlu sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini merupakan yang ketujuh kalinya di wilayah Riau," ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

KPK mencatat, sebelum kasus Bupati Kuansing Suhardiman Amby, terdapat enam perkara korupsi lain yang lebih dulu ditangani di Provinsi Riau. (tin,ist/dya)

Lokasi Alun-alun Kapanjen Dipastikan di Depan Stadion Kanjuruhan

MALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memastikan pembangunan Alun-Alun Kapanjen akan dipusatkan di kawasan depan Stadion Kanjuruhan. Saat ini, penetapan lokasi masih terus dimatangkan, dan telah memasuki tahap finalisasi. Selanjutnya proyek strategis tersebut menuju proses perencanaan dan pengadaan lahan.

"Lokasi alun-alun insyaallah sudah mengerucut di kawasan sekitar Stadion Kanjuruhan. Insyaallah posisinya di depan Stadion Kanjuruhan. Saat ini masih proses finalisasi," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, area yang disiapkan saat ini merupakan kompleks Islamic Center yang berada di sekitar stadion. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, alun-alun akan dibangun di atas lahan yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Malang.

Meski demikian, Pemkab Malang belum merinci kebutuhan anggaran maupun luas lahan yang akan digunakan. Sebelumnya, setelah lokasi

pembangunan bergeser ke kawasan Stadion Kanjuruhan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp150 miliar.

Dana tersebut direncanakan berasal dari dividen kepemilikan saham Pemkab Malang di Bank Jatim. Setiap tahun, pemerintah daerah menerima dividen sekitar Rp13,8 miliar dari penyertaan modal tersebut.

Tak hanya menghadirkan ruang terbuka publik, kawasan Alun-Alun Kapanjen juga dirancang memiliki fasilitas rest area dan sentra UMKM. Nantinya akan disediakan lapak bagi pelaku UMKM dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kapanjen dan sekitarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiard Anwar, mengatakan Kapanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang terus berkembang menjadi pusat pemerintahan, pelayanan publik, perekonomian, hingga aktivitas sosial masyarakat.

Karena itu, Budiard menyebut keberadaan alun-alun dinilai menjadi kebutuhan penting dalam mendukung

perkembangan kawasan tersebut.

Menurutnya, alun-alun tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi juga menjadi simbol identitas daerah, ruang interaksi sosial, ruang budaya, ruang edukasi, sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami berkomitmen mengedepankan pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemanfaatan publik," katanya.

Ia menegaskan, setiap tahapan pembangunan akan memperhatikan aspek tata ruang, kelestarian lingkungan, aksesibilitas, pelestarian budaya, hingga kepentingan generasi mendatang. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Terpisah, Bupati Malang, Sanusi sebelumnya juga memastikan



Nampak depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. (foto: ist)

pembangunan Alun-Alun Kapanjen tetap menjadi salah satu proyek strategis daerah. Pada 2026, pemerintah akan memfokuskan pekerjaan pada penyusunan perencanaan dan pengadaan lahan.

"Pada 2026 ini, pembangunan akan difokuskan pada tahap perencanaan dan pengadaan lahan. Sedangkan pelaksanaan konstruksi ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2027," ujar Sanusi. (Santi/Dya)

DLH Cari TPS Pengganti untuk Tangani Sampah di Jembatan Muharto



Lokasi pembuangan sampah di dekat Jembatan Muharto, Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG- Penanganan sampah di kawasan Jembatan Muharto, Kota Malang, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga kini masih mencari lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) pengganti sebagai solusi jangka panjang di kawasan tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang, mengatakan pencarian lokasi TPS baru masih terus dilakukan.

Pemilihan lokasi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan kemudahan akses bagi warga dan penggerobak sampah.

"Kami masih berupaya mencari lokasi TPS pengganti. Saat ini masih mencoba mencari area di sekitar lokasi yang memungkinkan," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Raymond, hingga kini belum ada target pasti kapan TPS pengganti tersebut dapat direalisasikan. Sebab, lokasi yang dipilih harus tetap berada tidak jauh dari titik penumpukan sampah yang selama ini berada di dekat Jembatan Muharto.

Apabila lokasi TPS dipindahkan terlalu jauh, kata Raymond, penggerobak sampah yang melayani kawasan Muharto akan kesulitan menjangkanya. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada perilaku masyarakat yang selama ini

mulai terbiasa tidak membuang sampah ke sungai.

"Kalau TPS baru terlalu jauh, penggerobak terutama dari Muharto akan kesulitan. Masyarakat yang saat ini sudah sadar untuk tidak membuang sampah ke sungai, kami khawatir nanti justru kembali membuang sampah ke sungai. Makanya kami masih mencari lokasi yang tidak terlalu jauh dari sana," jelasnya.

Selain faktor jarak, Raymond mengemukakan pihaknya juga mempertimbangkan kebutuhan lahan untuk mendukung operasional TPS. Untuk TPS skala kecil, luas lahan yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 100 meter persegi. Namun apabila dilengkapi sistem pengolahan air lindi, kebutuhan lahan dapat mencapai sekitar 200 meter persegi.

Saat ini, sejumlah lokasi tengah dipertimbangkan, di antaranya kawasan sekitar Jalan Muharto maupun di dekat Pemakaman Polehan, Kelurahan Polehan. Ditegaskannya, lokasi yang dipilih nantinya diutamakan merupakan aset milik

Pemkot Malang sehingga tidak memerlukan proses pembebasan lahan.

"Harapannya mungkin di sekitar Jalan Muharto atau dekat Pemakaman Polehan. Tentunya yang asetnya Pemkot," katanya.

Raymond juga menjelaskan, meski telah dipasang spanduk larangan membuang sampah di dekat Jembatan Muharto, titik tersebut masih dimanfaatkan sebagai lokasi penempatan sampah oleh warga maupun penggerobak.

Hal itu dipengaruhi tingginya volume sampah serta belum tersedianya lokasi penampungan lain yang lebih representatif di sekitar kawasan tersebut.

Untuk diketahui, selama ini tumpukan sampah berada di tepi jalan, tepat di sisi Jembatan Muharto. Lokasinya berada di kawasan yang memiliki aktivitas cukup padat karena berdekatan dengan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Kebalen, serta menjadi jalur penghubung menuju Flyover Kedungkandang. (Santi/Dya)

Panas ekstrem mengganggu infrastruktur jalan dan transportasi di banyak negara Eropa, karena melelehnya tar/aspal dan pemadaman listrik. (AP)



GELOMBANG PANAS EKSTREM EROPA BERGESER KE TIMUR

Gelombang panas ekstrem yang sebelumnya menghantam wilayah Eropa Barat kini bergerak menuju Eropa Tengah, Timur, hingga sebagian kawasan Selatan. Pergeseran ini memicu kenaikan suhu berbahaya di sejumlah negara, bahkan beberapa wilayah diperkirakan mengalami suhu di atas 40 derajat Celsius.

Ibu kota Hongaria, Budapest, menjadi salah satu wilayah yang berada dalam ancaman panas ekstrem. Berdasarkan prakiraan European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), suhu di Budapest berpotensi melewati angka 40 derajat Celsius pada Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, Rabu (1/7/2026) sejumlah kota lain juga mencatat suhu tinggi. Belgrade, Serbia, mencapai 38

derajat Celsius pada Senin, sedangkan Bukares, Rumania, berada di angka 37 derajat Celsius.

Di Slovakia, panas ekstrem bahkan memecahkan rekor nasional. Suhu mencapai 40,5 derajat Celsius di sebuah kota yang berada di wilayah perbatasan selatan. Angka tersebut melampaui rekor sebelumnya sebesar 40,3 derajat Celsius yang tercatat pada 2007.

Mengutip laporan The Guardian,

sejumlah negara Eropa telah menetapkan peringatan merah akibat kondisi panas ekstrem. Status tersebut diberlakukan di Hongaria, Polandia, Rumania, Serbia, Kroasia, Slovakia, serta Bosnia dan Herzegovina.

Pemerintah di negara-negara tersebut meminta masyarakat menghindari aktivitas luar ruangan, terutama saat suhu mencapai puncaknya. Warga juga diminta tetap

SUHU TERTINGGI YANG TERCATAT DI BEBERAPA NEGARA & WILAYAH EROPA

 Pulluau, Prancis
43,8°C

 Bilbao, Spanyol:
42,7°C

 Coschen, Jerman
41,7°C

 Hongaria
40,7°C

 Polandia
40,5°C

 Austria
40°C

 Inggris (UK)
37,3°C

Sumber : WMO

berada di dalam ruangan pada jam-jam terpanas untuk mengurangi risiko kesehatan.

Pemerintah Hongaria memperingatkan bahwa kondisi terburuk dari gelombang panas tersebut masih belum berakhir. Dua hari ke depan disebut menjadi periode paling berat.

Perdana Menteri Hongaria, Peter Magyar, mengajak masyarakat saling membantu menghadapi cuaca ekstrem.

Pemerintah setempat juga menyediakan akses ke lebih dari 2.000 pusat pendingin ber-AC yang dapat digunakan masyarakat, khususnya bagi warga yang tidak memiliki tempat perlindungan dari panas ekstrem di rumah. (wid,ist/dya)

WNI Dipantau, Secara Teknis Heatwave Tak Ancam RI

DI TENGAH gelombang panas ekstrem yang melanda sejumlah negara Eropa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan belum ada laporan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh perwakilan RI di negara-negara Eropa untuk memantau kondisi WNI.

"Terkait dengan heatwave di Eropa, kita sudah berkomunikasi dengan perwakilan-perwakilan kita di sana dan sampai saat ini belum ada WNI yang terdampak, yang menjadi korban," kata Heni dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski belum ada korban dari Indonesia, Kemlu memastikan langkah antisipasi tetap dilakukan.

Perwakilan RI di berbagai negara Eropa membuka layanan hotline serta menyampaikan imbauan kepada WNI agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.

"Semua perwakilan di Eropa membuka hotline dan juga menyampaikan kepada para WNI untuk waspada dan melakukan langkah-langkah agar tidak terlalu terdampak dengan kondisi panas ekstrem," ujar Heni.

Kemlu juga masih melakukan pendataan terhadap jumlah WNI yang berada di berbagai negara Eropa untuk memastikan kondisi mereka tetap terpantau.

Di sisi lain, meski suhu panas mulai terasa di sejumlah wilayah Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut Indonesia tidak mengalami fenomena gelombang panas seperti

yang terjadi di Eropa.

BMKG mencatat suhu tertinggi Indonesia mencapai 38,6 derajat Celsius di Papua Barat pada periode 22-24 Juni 2026. Namun, kondisi tersebut tidak masuk kategori heatwave. Menurut BMKG, gelombang panas secara teknis umumnya terjadi di wilayah lintang menengah hingga tinggi ketika udara panas terperangkap dalam sistem tekanan tinggi berskala luas.

Fenomena itu ditandai dengan suhu yang meningkat jauh di atas rata-rata klimatologis selama beberapa hari berturut-turut. (wid,ist/dya)





Tragedi Toilet di Balik Tren Hyrox Saat Tubuh Dipaksa Menembus Batas

Dentuman musik elektronik menggema dari dalam arena Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2. Lampu bernuansa industrial menyapu ruangan yang dipenuhi ribuan manusia dengan pakaian olahraga, sepatu lari, dan ekspresi penuh adrenalin. Keringat menjadi bagian dari atmosfer.

Aroma minyak angin bercampur dengan bau karet matras dan napas para peserta yang sedang memulihkan tenaga. Mereka datang bukan sekadar untuk berolahraga, melainkan untuk membuktikan satu hal yaitu seberapa jauh tubuh mereka mampu bertahan.

Mereka adalah peserta Hyrox, kompetisi kebugaran yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi fenomena baru di kalangan masyarakat urban.

Di permukaan, Hyrox tampak seperti perayaan gaya hidup sehat modern. Olahraga ini menggabungkan dua elemen yang sedang populer yaitu daya tahan lari dan kekuatan latihan fungsional.

Formatnya sederhana, tetapi brutal. Peserta harus menyelesaikan delapan kilometer lari yang diselingi delapan stasiun latihan berat. Tantangannya mulai dari mendorong

kereta besi dengan beban besar (sled push), menarik beban (sled pull), membawa beban berat (farmer's carry), hingga melakukan lemparan bola ke dinding (wall balls) berulang kali.

Bagi komunitas kebugaran, Hyrox menjadi simbol baru pencapaian fisik. Bukan hanya soal bentuk tubuh, tetapi juga tentang daya tahan, disiplin, dan kemampuan melewati batas diri. Popularitasnya semakin meningkat setelah sejumlah figur publik ikut ambil bagian.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo berhasil menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu di bawah dua jam. Sementara figur publik seperti Ibnu Jamil serta Sheryl Sheinafia turut membagikan pengalaman mereka di media sosial.

"HYROX telah diselenggarakan di lebih dari 30 negara di seluruh dunia," ujar William, perwakilan penyelenggara saat peluncuran ajang tersebut di Jakarta. Menurutnya, antusiasme komunitas olahraga Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat mulai mencari bentuk latihan yang lebih menantang.

Namun, di balik foto medali, konten olahraga, dan unggahan penuh

kebanggaan di media sosial, muncul cerita lain yang jauh dari kesan glamor. Cerita itu datang bukan dari podium juara, melainkan dari sisi paling manusiawi ketika tubuh yang kehilangan kendali.

Waspada 'Cepirit'

Percakapan mengenai Hyrox mendadak ramai di media sosial setelah sejumlah akun membagikan pengalaman peserta yang mengalami kejadian memalukan saat latihan maupun menghadapi kompetisi.

Istilah "cepirit"--buang air besar tanpa sengaja saat aktivitas fisik berat--menjadi bahan perbincangan. Bagi sebagian warganet, cerita itu terdengar lucu. Namun bagi pelaku olahraga endurance, kondisi tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang asing.

Salah satu pengguna X, @Jekiiiq., menilai kejadian tersebut masuk akal mengingat tuntutan fisik Hyrox. "Hyrox itu capek banget. Baru selesai lari, langsung disuruh dorong beban atau narik beban. Jadi nggak heran kalau ada beberapa orang yang nggak kuat tapi tetap maksa," tulisnya.

Di balik reaksi publik yang bercampur antara tertawa dan penasaran, ada pertanyaan yang lebih serius: mengapa olahraga yang identik dengan kesehatan justru bisa membuat tubuh kehilangan kontrol? Jawabannya ada pada cara tubuh merespons tekanan ekstrem.

Edukator kesehatan dr. Adam Prabata menjelaskan bahwa fenomena tersebut memiliki istilah medis, yakni exercise-associated gastrointestinal symptoms (EAGIS).

"Fenomena 'cepirit' saat sedang olahraga intens itu ada namanya yaitu exercise-associated gastrointestinal symptoms (EAGIS). Kejadian ini nggak

dialami oleh semua orang, tapi angka kejadiannya meningkat pada olahraga dengan intensitas tinggi," ujar dr. Adam.

Menurutnya, gangguan pencernaan saat olahraga berat bisa muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari rasa mual, kram perut, mulas, ingin buang air besar secara tiba-tiba, hingga diare.

Fenomena ini juga sering ditemukan pada olahraga daya tahan seperti lari jarak jauh. Dalam dunia olahraga, kondisi tersebut dikenal sebagai runner's trot, yaitu gangguan pencernaan yang dialami pelari akibat kombinasi tekanan fisik, gerakan tubuh, dan perubahan kerja organ selama aktivitas berat.

Spesialis kedokteran olahraga dr. Antonius Andi Kurniawan, SpKO, menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi karena tubuh mengalami perubahan distribusi aliran darah ketika berolahraga.

Saat seseorang berlari atau mengangkat beban dalam intensitas tinggi, tubuh memasuki kondisi stres fisiologis. Sistem saraf akan mengaktifkan mekanisme bertahan hidup dengan mengutamakan suplai darah ke organ yang paling membutuhkan energi: jantung, paru-paru, dan otot.

Akibatnya, aliran darah menuju saluran pencernaan dapat berkurang. Kondisi ini disebut splanchnic hypoperfusion. Ketika usus tidak mendapatkan suplai darah optimal, fungsi pencernaan dapat terganggu. Kontraksi usus bisa berubah, penyerapan cairan terganggu, dan tubuh memberi sinyal berupa rasa mulas atau dorongan buang air besar. Dalam beberapa kondisi, (ist/dya)

Ambisi Jepang Panen Energi Bangun 'Cincin' Matahari' di Bulan

Gagasan memanen energi dari luar angkasa kembali mencuat. Jepang melalui perusahaan konstruksi Shimizu Corporation mengusulkan proyek ambisius bernama Luna Ring, sebuah konsep pembangkit listrik tenaga surya raksasa yang dibangun mengelilingi Bulan.

Proyek tersebut membayangkan pemasangan sabuk panel surya sepanjang sekitar 11.000 kilometer di sepanjang garis khatulistiwa Bulan. Energi dari cahaya Matahari yang ditangkap panel itu nantinya tidak digunakan di Bulan, melainkan dikirim kembali ke Bumi melalui teknologi transmisi nirkabel menggunakan gelombang mikro (microwave) dan laser.

Konsep Luna Ring atau cincin matahari pertama kali diperkenalkan setelah tragedi gempa dan tsunami Tohoku pada 2011 yang memicu krisis di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi. Peristiwa tersebut membuat Jepang kembali mencari alternatif sumber energi yang dianggap lebih aman dan berkelanjutan dibanding ketergantungan terhadap energi nuklir.

Shimizu menilai Bulan memiliki kondisi yang jauh lebih ideal dibanding Bumi untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya. Salah satu alasannya karena permukaan Bulan tidak memiliki atmosfer yang menghalangi pancaran cahaya Matahari.

Dengan panel surya yang ditempatkan di wilayah khatulistiwa Bulan, sistem tersebut secara teoritis dapat menerima paparan sinar

Matahari secara terus-menerus tanpa gangguan cuaca seperti awan, hujan, atau perubahan musim yang terjadi di Bumi.

Selain itu, intensitas energi Matahari di luar angkasa juga lebih besar karena tidak mengalami pelemahan akibat proses penyebaran cahaya di atmosfer.

Listrik untuk Bumi

Dalam rancangan Luna Ring, panel-panel surya di permukaan Bulan akan mengubah cahaya Matahari menjadi energi listrik.

Energi tersebut kemudian dialirkan melalui jaringan kabel menuju fasilitas transmisi yang berada di sisi Bulan yang selalu menghadap ke arah Bumi.

Di fasilitas itu, listrik akan dikonversi menjadi pancaran energi berbentuk gelombang mikro dan laser berdaya tinggi. Pancaran tersebut diarahkan menuju stasiun penerima di Bumi yang disebut rectenna.

Rectenna berfungsi menangkap gelombang energi dari luar angkasa dan mengubahnya kembali menjadi listrik arus searah (DC) yang dapat digunakan untuk jaringan energi.

Selain memasok kebutuhan listrik, energi tersebut juga berpotensi digunakan untuk memproduksi hidrogen sebagai bahan bakar masa depan sekaligus media penyimpanan energi.

Shimizu memperkirakan kapasitas energi Luna Ring secara teoritis dapat mencapai 13.000 terawatt. Angka itu disebut setara sekitar 500 kali lipat dibanding total konsumsi listrik dunia saat ini. Karena skala proyek yang sangat besar, pembangunan Luna Ring tidak akan



sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia.

Shimizu merancang sebagian besar konstruksi dilakukan oleh robot yang dikendalikan dari Bumi.

Material pembangunan juga direncanakan berasal langsung dari permukaan Bulan untuk mengurangi kebutuhan pengiriman material dari Bumi yang membutuhkan biaya sangat besar.

Pasir Bulan, misalnya, dapat diolah menjadi material konstruksi struktural seperti beton bermutu tinggi melalui proses

geopolymerization. Sementara itu, material penting lainnya seperti serat kaca untuk penguat bangunan, panel surya, hingga komponen pendukung berbasis logam juga diproduksi langsung di lokasi dengan memanfaatkan teknik manufaktur aditif (3D printing). Konsep pemanfaatan sumber daya lokal atau In-Situ Resource Utilization (ISRU) ini merupakan upaya krusial dalam mengatasi salah satu tantangan terbesar. (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDOARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAANG I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT
PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Dari Stadion ke Jalanan, Jersey Sepak Bola Berubah Jadi Simbol Fesyen Baru

Dulu, jersey sepak bola hanya identik dengan pertandingan. Baju yang dikenakan pemain di lapangan dan para supporter yang memenuhi tribun stadion untuk menunjukkan dukungan kepada klub atau negara kebanggaan.

Namun kini, jersey telah mengalami perubahan besar. Pakaian yang dulunya dianggap sebagai atribut olahraga mulai bertransformasi menjadi bagian dari dunia fashion. Di jalanan kota, pusat perbelanjaan, hingga media sosial, jersey sepak bola semakin sering muncul sebagai pilihan outfit harian.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana batas antara olahraga dan fashion semakin kabur. Jersey tidak lagi hanya berbicara soal skor pertandingan atau loyalitas terhadap klub, tetapi juga menjadi cara seseorang mengekspresikan identitas, selera, dan gaya hidup.

Menurut laporan berbagai media fesyen internasional, termasuk Vogue, meningkatnya popularitas jersey sepak bola menjadi bagian dari tren besar ketika elemen olahraga masuk ke dunia mode. Pakaian olahraga kini tidak hanya dilihat dari sisi fungsi, tetapi juga nilai estetika dan budaya yang melekat di dalamnya. Hal serupa terlihat dari tren yang berkembang di media sosial. Banyak kreator konten, influencer, hingga selebritas mulai memadukan jersey sepak bola dengan berbagai gaya yang jauh dari kesan olahraga.

Jersey dipakai bukan

hanya saat menonton pertandingan, tetapi juga saat bepergian, nongkrong, bahkan menghadiri acara santai.

Jersey Tidak Lagi Hanya Milik Supporter

Perubahan terbesar dalam tren ini adalah bergesernya persepsi terhadap jersey.

Jika sebelumnya jersey identik dengan penggemar sepak bola, kini banyak orang yang mengenakannya meski tidak mengikuti pertandingan secara rutin.

Alasannya beragam. Ada yang tertarik karena desainnya menarik, warna yang unik, potongan yang nyaman, hingga nilai nostalgia dari klub atau pemain tertentu. Jersey klub besar dunia maupun desain retro semakin diminati karena memiliki cerita dan karakter.

Sebuah jersey bukan hanya kain dengan logo tim. Di dalamnya ada identitas, sejarah, bahkan kenangan yang membuat pemakainya merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar.

Munculnya Tren Blokecore

Salah satu gaya yang ikut mendorong popularitas jersey adalah blokecore.

Tren ini menggabungkan jersey sepak bola dengan pakaian kasual sehari-hari. Gaya tersebut banyak berkembang di kalangan anak muda karena dianggap mudah diterapkan, nyaman, tetapi tetap terlihat fashionable.

Ciri khas blokecore biasanya berupa jersey sepak bola yang dipadukan dengan Celana jeans

longgar; Sneakers klasik; Jaket kasual dan Topi atau aksesoris sederhana. Gaya ini memberi kesan santai seperti budaya sepak bola Inggris era lama, tetapi dikemas ulang menjadi lebih modern.

Media fesyen seperti Who What Wear juga melihat jersey semakin sering muncul dalam inspirasi street style karena generasi muda mulai mencari pakaian yang tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memiliki cerita.

Pengaruh Turnamen Besar dan Budaya Pop

Popularitas jersey sepak bola juga tidak lepas dari besarnya pengaruh turnamen internasional.

Ajak sepak bola dunia menjadi momen ketika jersey kembali menjadi sorotan. Ketika pertandingan besar berlangsung, antusiasme terhadap seragam tim meningkat dan kemudian terbawa ke gaya berpakaian sehari-hari.

Selain itu, budaya selebritas ikut memperkuat tren ini. Banyak figur publik dunia terlihat mengenakan jersey sebagai bagian dari gaya casual mereka.

Bisa Dipadukan untuk Banyak Gaya

Salah satu alasan jersey semakin digemari adalah karena mudah dipadukan. Untuk tampilan sederhana, jersey bisa dipakai bersama jeans dan sneakers.

Bagi yang ingin tampil lebih rapi, jersey dapat dikombinasikan dengan celana atau outer seperti blazer dan jaket. (ist/dya)



Anomali Beras,...dari hal 1

Harga beras kembali menghadirkan paradoks. Di tengah klaim pemerintah mengenai melimpahnya cadangan pangan nasional, harga beras justru terus bergerak naik di hampir seluruh rantai distribusi. Dari penggilingan, grosir, hingga pasar eceran, tekanan harga belum mereda.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini meningkat dibandingkan Mei 2026 yang berada di level 3,08 persen. Secara bulanan, inflasi Juni tercatat 0,44 persen (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,28 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan inflasi Juni terutama dipengaruhi oleh sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga.

"Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh BPS, inflasi untuk mtm pada kondisi Juni 2026 ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga beberapa komoditas. Ini komoditas yang memberikan andil terbesar terutama bensin," ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bensin menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi sebesar 4,53 persen dan memberikan andil 0,21 persen terhadap inflasi bulanan. Setelah itu, beras menyumbang inflasi 0,45 persen dengan andil 0,02 persen.

Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada angkutan udara yang mengalami inflasi 6,11 persen dengan andil 0,05 persen. Bawang merah naik 6,52 persen dengan andil 0,04 persen. Sementara bawang putih mengalami inflasi 6,88 persen dengan andil 0,03 persen.

Namun tekanan harga beras menjadi sorotan karena terjadi ketika produksi dan stok nasional disebut berada dalam kondisi aman.

Produksi Naik, Lahan Bertambah

BPS memperkirakan produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,28 juta ton. Jumlah tersebut naik sekitar 0,01 juta ton atau 0,05 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Ateng menjelaskan kenaikan produksi beras tersebut mengikuti proyeksi peningkatan produksi padi dalam delapan bulan pertama tahun ini.

"Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 diperkirakan mencapai 25,28 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton atau meningkat 0,05

persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025," kata Ateng.

Pada periode Juni hingga Agustus 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 8,42 juta ton atau tumbuh 1,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski demikian, produksi pada Mei 2026 tercatat mengalami penurunan. BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi masyarakat pada Mei mencapai 2,84 juta ton, turun 3,43 persen dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 2,94 juta ton.

Produksi padi pada periode yang sama juga turun. Pada Mei 2026, produksi padi diperkirakan mencapai 4,92 juta ton gabah kering giling (GKG), lebih rendah 3,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,09 juta ton GKG.

Secara kumulatif, produksi padi Januari-Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 43,89 juta ton GKG, naik sekitar 0,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi luas panen, BPS mencatat luas panen padi pada Mei 2026 mencapai 0,98 juta hektare atau turun 2,35 persen secara tahunan.

Namun untuk periode Juni-Agustus, luas panen diperkirakan meningkat menjadi 2,88 juta hektare atau naik 1,38 persen.

Secara keseluruhan, luas panen Januari-Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 8,35 juta hektare, bertambah 0,04 juta hektare atau 0,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski produksi relatif terjaga, harga beras tetap mengalami tekanan.

BPS mencatat kenaikan harga beras terjadi di seluruh jalur perdagangan. Di tingkat penggilingan, harga beras secara total naik 0,97 persen secara bulanan dan meningkat 6,96 persen secara tahunan.

Beras premium menjadi jenis yang mengalami kenaikan paling tinggi. Harga beras premium di tingkat penggilingan naik 1,01 persen secara bulanan dan melonjak 11,66 persen dibandingkan Juni 2025. Rata-rata harganya mencapai Rp14.815 per kilogram.

Sementara harga beras medium naik 0,92 persen secara bulanan dan meningkat 5,10 persen secara tahunan menjadi Rp13.525 per kilogram.

Kenaikan berlanjut di tingkat

grosir. BPS mencatat inflasi harga beras grosir sebesar 0,82 persen secara bulanan dan 5,12 persen secara tahunan.

Di tingkat konsumen, harga beras eceran naik 0,45 persen secara bulanan dan 3,98 persen secara tahunan.

Ateng menegaskan angka tersebut merupakan rata-rata nasional yang mencakup berbagai jenis kualitas beras dan seluruh wilayah Indonesia.

"Harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia," ujar Ateng. (wid,kcm,ist,rls/dya)

NTP JUNI 2026

NTP Nasional
127,65 (turun 0,06%)

NTUP Nasional
Turun 0,24%

BPPBM
Naik 0,74%.

Penurunan NTP terbesar
Riau (-6,62%)

Tren Grafik:
Juli 2025

122,64

Mei 2026:

127,73

Juni 2026

127,65

**Nilai Tukar Petani
Justru Turun**

KENAIKAN harga beras belum menjadi kabar baik bagi petani. Di tengah harga beras yang bergerak naik di berbagai jalur distribusi, posisi tawar petani justru melemah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65, turun tipis 0,06 persen dibandingkan Mei 2026.

Penurunan NTP terjadi karena kenaikan harga yang diterima petani tidak mampu mengejar kenaikan biaya yang harus mereka keluarkan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, indeks harga yang diterima petani (It) hanya naik 0,49 persen.

Sementara indeks harga yang dibayar petani (Ib) meningkat lebih tinggi, yakni 0,55 persen.

"Hal ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,49 persen, atau lebih rendah dari indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang naik 0,55 persen," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Data tersebut menunjukkan paradoks dalam rantai pangan. Harga beras naik di tingkat pasar, tetapi peningkatan harga itu tidak otomatis memperbaiki kesejahteraan petani.

BPS mencatat kenaikan harga

beras terjadi di seluruh jalur distribusi sepanjang Juni 2026. Di tingkat penggilingan, harga beras naik 0,97 persen secara bulanan (month to month/mtm). Di tingkat grosir meningkat 0,82 persen. Sementara di tingkat eceran, harga naik 0,45 persen.

"BPS turut mencatat kenaikan rata-rata harga beras di setiap tingkatan pada bulan Juni 2026," kata Ateng.

Menurut dia, kenaikan harga beras di tingkat penggilingan menjadi salah satu gambaran adanya tekanan harga dari sisi produksi dan distribusi.

Namun, kenaikan harga beras tersebut tidak serta-merta mengangkat pendapatan petani. Biaya yang harus dibayar petani justru tumbuh lebih cepat.

Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara harga yang dibayar konsumen dengan pendapatan yang diterima petani di tingkat awal rantai produksi.

Di sisi lain, tekanan inflasi nasional pada Juni 2026 juga masih meningkat. BPS mencatat inflasi bulanan mencapai 0,44 persen. Secara tahun kalender (year to date/ytd), inflasi mencapai 1,79 persen. Sementara inflasi tahunan berada di level 3,34 persen (year on

year/yoy).

"Pada Juni 2026 terjadi inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan atau month-to-month, dan terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 111,40 pada Mei 2026 meningkat menjadi 111,89 pada Juni 2026," ujar Ateng.

Penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok transportasi. Kelompok ini mengalami inflasi 2,29 persen dan memberikan andil 0,28 persen terhadap inflasi umum.

Kenaikan tersebut terutama dipicu harga bensin, khususnya BBM nonsubsidi seperti Pertamina, tarif angkutan udara, serta pelumas atau oli mesin.

Ateng menyebut bensin menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi bulanan, yakni 0,21 persen. Tarif angkutan udara menyumbang 0,05 persen, sedangkan pelumas atau oli mesin memberikan andil 0,01 persen. (wid,ist/dya)

PINDAH JUALAN LEWAT WA, PEDAGANG ONLINE TETAP DIPAJAKI

Pedagang online yang beralih jualan dari marketplace ke website pribadi, media sosial, hingga WhatsApp tetap tidak bisa lepas dari kewajiban pajak. Pemerintah menegaskan perpindahan kanal penjualan bukan berarti transaksi terbebas dari pungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22.

Kebijakan ini muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk empat marketplace besar, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, sebagai pemungut PPh Pasal 22. Penunjukan berlaku mulai 1 Juli 2026, sementara pemungutan kepada pedagang mulai diterapkan pada 1 Agustus 2026 setelah masa transisi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah tidak mempersoalkan jika pedagang memilih memindahkan transaksi ke kanal lain sebagai strategi bisnis.



Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026) (ANTARA)

“Kalau ada behavioral responses wajib pajak kemudian mengalihkan transaksinya dari marketplace ke website pribadi, ke media sosial pribadi, ke WhatsApp, tidak ada masalah. Sepanjang itu merupakan hak mereka untuk mendiversifikasi channel of sales,” ujar Bimo dalam Media Briefing, Rabu (1/7/2026).

Namun, menurut Bimo, perubahan platform tidak menghapus tanggung jawab perpajakan. DJP tetap memiliki

cara untuk mengawasi kewajiban pajak pelaku usaha meski transaksi tidak lagi terjadi melalui marketplace.

“Jadi tentu itu merupakan pilihan bagi para pebisnis. Kami juga punya channel untuk mereview kewajiban perpajakan dari channel apa pun si wajib pajak melakukan transaksinya,” tegasnya.

Bimo juga menilai marketplace masih memiliki daya tarik bagi pedagang maupun pembeli karena

menawarkan ekosistem transaksi yang lebih aman dan terintegrasi, mulai dari pembayaran hingga penyelesaian transaksi.

“Pembeli juga akan merasakan kepastian keamanan pembayaran dan kepastian transaksi dan hak kewajiban di situ,” katanya.

Pemerintah menegaskan aturan ini bukan pajak baru. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, mekanisme pembayaran PPh hanya diubah, dari sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk.

Kebijakan tersebut diterapkan seiring pertumbuhan perdagangan digital yang semakin besar. Pemerintah menyebut tujuan aturan ini bukan hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga menciptakan persaingan yang lebih setara antara pelaku usaha online dan offline.

Meski demikian, tidak semua pedagang online otomatis dikenai pungutan PPh Pasal 22. DJP menyebut ada enam kategori yang dikecualikan.

Pertama, wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun yang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

“Silakan disampaikan surat pernyataan ke marketplace, maka marketplace tidak akan melakukan pemungutan,” ujar Bimo.

Kedua, jasa pengiriman atau ekspedisi yang dijual oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi penyedia jasa angkutan.

Ketiga, pedagang yang telah memiliki surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Keempat, penjualan pulsa dan kartu perdana. Kelima, transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata, dan sejenisnya dalam kondisi tertentu. Keenam, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan beserta perjanjian pengikatannya.

“Pesannya, tidak semua pedagang di marketplace otomatis akan dipungut,” kata Bimo.

Bagi pedagang yang tetap masuk dalam kategori wajib pajak, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto. Pajak tersebut nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final sesuai aturan yang berlaku.

Penerapan pajak bagi pedagang online mulai menjadi sorotan setelah pemerintah menunjuk sejumlah marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Namun, tidak semua penjual di platform digital otomatis dikenai pajak.

Banyak pelaku usaha kecil mengira setiap transaksi akan langsung dipotong pajak. Padahal, aturan yang berlaku masih memberikan batas omzet yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. (tin ist/dya)

Apindo: Harga Barang Bisa Naik

tidak tertutup kemungkinan (kenaikan harga barang),” kata Siddhi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Siddhi, tambahan kewajiban administrasi dan mekanisme pemungutan pajak dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pedagang dalam menentukan harga jual. Namun, keputusan menaikkan harga tidak sepenuhnya berada di tangan penjual karena tetap dipengaruhi oleh persaingan dan daya beli konsumen.

“Memang ya nanti akan mekanisme pasar lah yang menentukan,” ujarnya.

Meski demikian, Apindo menilai kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru. Pemerintah hanya mengubah mekanisme pembayaran PPh, yang sebelumnya disetor langsung oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang telah ditunjuk.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menunjuk empat marketplace, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai

pemungut PPh Pasal 22. Penunjukan berlaku mulai 1 Juli 2026, sementara pemungutan kepada pedagang mulai berjalan pada 1 Agustus 2026 setelah masa transisi.

Aturan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Dalam kebijakan ini, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet pedagang yang memenuhi ketentuan.

Namun, Siddhi menegaskan tidak semua pelaku usaha di marketplace akan langsung terkena pungutan. Pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap dapat memperoleh pengecualian sepanjang memenuhi persyaratan dan menyampaikan surat pernyataan sesuai aturan.

“Tidak semua pedagang di marketplace otomatis akan dipungut,” kata Siddhi. (wid,ist/dya)

BEBERAPA HAL TENTANG PAJAK PEDAGANG ONLINE

Pajak dipungut marketplace sebesar PPh Pasal 22 tarif 0,5% dari peredaran bruto (omzet)

1. SIAPA YANG TIDAK KENA PAJAK?

- Pedagang online orang pribadi dengan omzet ≤ Rp500 juta per tahun.
- Tidak dikenai PPh Final UMKM (tidak dipungut pajak oleh marketplace).

2. SYARAT KENA PAJAK (PPh FINAL UMKM)

Pedagang online orang pribadi dikenai PPh Final 0,5% jika:

- Omzet > Rp500 juta s.d. ≤ Rp4,8 miliar per tahun.
- Belum memilih menggunakan skema perpajakan umum.



PENERAPAN pajak bagi pedagang online melalui marketplace berpotensi membuat harga barang mengalami penyesuaian. Namun, seberapa besar kenaikan harga akan sangat bergantung pada kondisi pasar dan respons pelaku usaha.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace masih membutuhkan proses sosialisasi sebelum dampaknya terlihat.

“Ya memang kalau dilihat kan pertama ini tentu perlu sosialisasi dulu ya. Setelah sosialisasi memang